

PAPUA BARAT ANGGARKAN RP 5 MILIAR UNTUK BEASISWA DOKTER SPESIALIS ASLI PAPUA



Sumber gambar: antaranews.com

Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Kesehatan mengalokasikan dana sebesar Rp5 miliar guna mendukung program beasiswa pendidikan dokter spesialis bagi putra-putri asli Papua (OAP). Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat, dr. Alwan Rimosan, menyampaikan pada Senin bahwa pendanaan program ini bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan keahlian tenaga kesehatan dari kalangan OAP. Menurut Alwan, pada tahun 2024 sudah ada 16 orang OAP yang mengikuti pendidikan dokter spesialis, dan tahun 2025 ditargetkan akan bertambah menjadi 23 orang. Program ini merupakan kelanjutan dari inisiatif tahun sebelumnya. "Target kita tahun ini 23 peserta. Tahun lalu sudah ada 16 orang yang ikut program ini," ujarnya. Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan program ini diatur melalui Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 211 Tahun 2024 tentang Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis Otsus, yang sejalan dengan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Papua Barat Nomor 4 Tahun 2021 terkait pemanfaatan dana otsus di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi.

Peserta program akan menjalani proses seleksi, terutama untuk memastikan bahwa mereka benar-benar merupakan orang asli Papua. "Seleksinya akan lebih ke aspek administratif untuk memverifikasi keaslian OAP," jelas Alwan. Ketua Majelis Rakyat Papua Barat, Judson Ferdinandus Waprak, menyambut baik program ini dan menyebutnya sebagai solusi jangka panjang atas kekurangan dokter spesialis di wilayah tersebut. Ia menekankan pentingnya perancangan mekanisme program beasiswa ini agar inklusif dan mudah diakses oleh masyarakat asli Papua di tujuh kabupaten di provinsi ini. "Harapannya, Papua Barat tidak terus menerus bergantung pada dokter kontrak dari luar daerah," ucap Judson.

Ia menambahkan bahwa meskipun sejumlah rumah sakit di Papua Barat sudah memiliki fasilitas yang memadai, masih terdapat kekurangan tenaga dokter spesialis, sehingga pemerintah terpaksa mengontrak dokter dari luar provinsi. "Kalau terus mengontrak dokter, biayanya besar dan tidak efisien. Akan lebih baik jika kita cetak tenaga ahli sendiri," tuturnya. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Papua Barat 2025–2029, tercatat ada 237 dokter yang tersebar di 12 rumah sakit pemerintah dan satu rumah sakit swasta di provinsi tersebut. Distribusinya antara lain: 38 dokter di Kabupaten Manokwari, 28 di Teluk Bintuni, 19 di Kaimana, 16 di Fakfak, 14 di Teluk Wondama, sembilan di Pegunungan Arfak, dan enam dokter di Manokwari Selatan.

Sumber Berita:

Antaraneews.com, “*Papua Barat Anggarkan Rp5 Miliar untuk Beasiswa Dokter Spesialis Asli Papua*”, tanggal 19 Mei 2025

Catatan:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada :

- a. Pasal 3 menyatakan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
- b. Pasal 46 ayat (2) menyatakan pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.